

STUDI ISLAM DAN RADIKALISME PENDIDIKAN DALAM KONTEKS MASYARAKAT MAJEMUK

Ahmad Ali Riyadi¹

Abstrak:

Tulisan berikut menjelaskan tentang perlunya rekonstruksi filosofis pendidikan Islam dalam kancah masyarakat multikulturalisme. Ada keengganan tersendiri untuk mengatakan pendidikan Islam telah gagal membentuk masyarakat majemuk. Ada paradoks pada satu sisi pendidikan berperan sebagai pengelola pengembangan sumber daya manusia akan tetapi di sisi yang lain pendidikan Islam telah menghasilkan lulusannya menjadi mesin pembunuh yang sangat mengerikan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam, pertama, kesadaran magis (magical consciousness), kedua, kesadaran naif (naival consciousness) dan kesadaran kritis (critical consciousness)

Kata kunci: *Pendidikan Islam, Humanis, budaya dan multikulturalisme*

Abstract

The following article describes the need for a philosophical reconstruction of Islamic education in a multiculturalism society. There is reluctance in itself to say that Islamic education has failed to form a pluralistic society. There is a paradox that on the one hand education plays a role as the manager of human resource development, but on the other hand Islamic education has produced its graduates into a very terrible killing machine. There are several principles that must be considered in developing Islamic educational institutions, first, magical consciousness, second, naive consciousness and critical consciousness.

Keywords: Islamic education, humanist, culture and multiculturalism

¹Ahmad Ali Riyadi, alumni Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006, dan dosen Pascasarjana UNISNU Jepara.

A. Pendahuluan

Sudah *kadung* menjadi komitmen bersama bahwa pendidikan mempunyai peran yang luhur dan agung. Sifat yang agung ini ditunjukkan dari peran pendidikan yang dipahami sebagai pemberian bekal peserta didik untuk menghadapi masa depannya, juga peran pendidikan dipahami sebagai sarana untuk pencerdasan seseorang. Sehingga pendidikan dapat menjadi peran untuk meramalkan nasib seseorang di masa depannya karena dalam pendidikan orang diajarkan ilmu tertentu yang menjadi keahlian seseorang. Jika orang belajar kedokteran maka dipastikan ia akan menjadi dokter, jika orang belajar di keguruan maka dapat diramalkan ia akan menjadi guru, dan sebagainya. Sebegitu mulianya peran pendidikan sehingga orang tidak pernah merasa curiga terhadap makhluk yang bernama pendidikan.

Akan tetapi jika peran teoritis pendidikan tersebut dicek dalam kancan realitas, maka tentu akan menjadi pertanyaan. Banyak kasus menunjukkan terjadinya keganjalan-kejanggalan pendidikan. Secara intelektual, pendidikan menjadi ajang kritik dari para pengguna jasa pendidikan, di antaranya adalah Paulo Freire dan Ivan Illich. Orang tercengang dengan kritik yang dilakukan kedua pakar tersebut. Bagi Paulo Freire, pendidikan tidak ubahnya membuat

seseorang terasing (*culture of silence*) dengan dunia luarnya, sedang Ivan Illich menyerukan dengan bebaskan masyarakat dari belenggu sekolah (*deschooling society*). Mereka tidak sepakat dan tidak puas dengan adanya lembaga pendidikan formal yang selama ini berlangsung (Paulo Freire, 2002; Ivan Illich, 2000).

Secara realitas, munculnya kekerasan atas nama agama akibat keyakinan seseorang menjadi bukti kegagalan pendidikan. Kekerasan FPI (Front Pembela Islam) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (AKKBB), kerusuhan Poso, kerusuhan Ambon dan lainnya menjadi bukti bahwa pendidikan, dalam hal ini pendidikan agama, telah menjadi mesin perang yang ampuh dan sangat mengerikan. Ada paradoks, pada satu sisi pendidikan yang mengajarkan pada kedamaian akan tetapi kenyataannya telah mencetak teror dan kerusuhan. Ada apa dengan pendidikan? Apakah pendidikan tidak mampu lagi menyuguhkan penghargaan di tengah masyarakat pluralisme? Tulisan singkat ini akan memaparkan secara singkat beberapa persoalan paradoks yang terjadi dalam pendidikan.

B. Pendidikan Sebagai Rekayasa Budaya

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah

bahwa pendidikan adalah sebagai sebuah gagasan atau rekayasa yang menimbulkan budaya. Rekayasa budaya atau disebut dengan invasi kultural merupakan penyerbuan dengan bantuan sarana budaya terhadap kebudayaan lain, sehingga terjadi penaklukan budaya yang pada akhirnya mengalami proses pemalsuan kultural atau keterasingan terhadap budayanya sendiri (Paulo Freire, dkk., 2002: xii).

Dari sini dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan merupakan sarana yang paling ampuh untuk pembentukan karakter pribadi seseorang serta propaganda nilai-nilai budaya yang dianggap penting bagi penggagas. Setahap demi setahap orang akan mengalami penyerbuan kultural dengan mengoper budaya asing yang menyergap dirinya. Dengan demikian, seseorang tersebut tidak akan dapat menghayati budayanya sendiri. Tentu hal ini akan membawa akibat buruk dari rekayasa pendidikan, yakni; pertama, menjauhkan seseorang dari tradisi dan nilai-nilai budayanya sendiri, kedua, memunculkan rasa keterasingan terhadap hakekat diri sendiri, serta kondisi sisio budaya sendiri dan proses tidak mengenali jati dirinya sendiri, yang kemudian timbul rasa malu terhadap kekayaan budaya sendiri sebab dianggap inferior, *ndesani*. (Kartini Kartono, 1997: 132).

Pendidikan menjadi sarana rekayasa yang dapat mengarahkan seseorang untuk mengikuti dan menyakini kebenaran yang didapatkan lewat kerangka berpikir keilmuan yang dihasilkan. Kerangka ini menjadikan seseorang tidak mampu keluar dari jeratan pemahaman ilmu yang didapatkan dari lembaga pendidikan. Indoktrinasi lebih mendominasi dan memaksakan kemauan ide-ide edukatif tanpa memperhatikan kebutuhan, harapan dan aspirasi pengguna jasa pendidikan. Penggagas ingin membentuk pribadi pengguna jasa pendidikan sesuai dengan citra penggagas. Karena itu pengguna jasa pendidikan dirampsa dari kata-kata, pikiran, bahasa, pengalaman hidup dan kebudayaannya, agar mudah diserbu dan diisi dengan nilai-nilai dan benda-benda asing yang cocok dengan kepentingan penggagas.

Oleh karena itu, lambat laun orang-orang yang ditaklukkan akan mengoper lalu mengasyiki semua peristiwa di sekelilingnya tidak lagi dengan mata dan hati nurani sendiri akan tetapi menghayati semua kejadian di sekitarnya dengan keinginan penggagas. Semakin patuh dan makin otomatis orang-orang yang diserbu itu menirukan pola tingkah laku para penyerbunya, maka akan dianggap semakin prima dan semakin sukseslah proses pendidikan. Oleh karena itu, proses pembudayaan disebut berhasil

apabila orang tunduk secara mutlak dan pasif menerima semua perintah yang diberikan oleh para penggagas.

Dalam realitas sejarah, peranan pendidikan sebagai sarana budaya ini dapat dicermati dari munculnya berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk oleh kekuatan ormas-ormas maupun kekuatan politik kekuasaan. Misalkan munculnya berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang disokong oleh penggagas yang beraliansi pada kepentingan kebijakan politik tertentu. Sebagai bentuk eksperimen untuk mendukung argumen ini, misalkan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi di bidang demokrasi dengan menjunjung tinggi hak-hak individu, maka tentunya tersusunlah sistem pendidikan yang memperhatikan dan mengembangkan penghargaan terhadap hak-hak individu. Akan tetapi sebaliknya, di negara totaliter dengan pemerintahan yang menguasai segala-galanya lewat kekuasaan absolut, pemerintah membatasi kebebasan individu dengan memberikan pendidikan yang uniform bagi semua obyek didik. Sistem pendidikannya cuman satu yakni mencerminkan ide-ide politik para politisi yang berkuasa. Obyek didik harus bersikap otokratis dan mutlak sebab dengan sepenuhnya obyek didik harus melaksanakan semua perintah para penguasa politik yang bersifat

otoriter. Bagi negara otoriter, pendidikan adalah kekuatan politik untuk mendominasi rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah secara mutlak mengatur pendidikan. Begitu juga dalam bentuk negara yang menganut ideologi otokratis dengan pemimpin seorang raja, kekuatan politik mempunyai kekuatan yang sangat besar bahkan sangat absolut tidak terbatas dalam mempengaruhi praktek pendidikan. Negara mempunyai wewenang untuk memilih dan menentukan sistem pendidikan untuk subyek-obyek didik. Keduanya harus patuh dan tunduk mengikuti segala keputusan pemerintah. Pada negara yang menganut sistem oligarkis yang diperintah oleh beberapa penguasa yang terpilih dan mahakuasa juga mengembangkan sistem pendidikan yang monolinier seperti negara otokratis. Sistem pendidikannya mengutamakan pendidikan bagi kelompok-kelompok tertentu yang dipersiapkan akan menjadi penerus penguasa. Sedangkan rakyat banyak dibiarkan tidak terdidik dan dalam keadaan terbelakang sebagai abdi penguasa.

Hal yang sama juga terjadi di negara-negara yang menganut sistem ideologi kapitalisme dan komunisme. Di negara kapitalis, politik dan negara dikuasai oleh sekelompok pemodal. Lembaga pendidikan umumnya dikuasai oleh pemodal sehingga pada umumnya lembaga pendidikan dikembangkan

atas dasar investasi. Konsekuensinya lembaga pendidikan dibangun atas dasar bisnis dan keuntungan ada pada pemilik modal. Di negara komunis yang menerapkan diktator proletariat menerapkan pendidikan sebagai fungsi negara. Pendidikan merupakan senjata strategis untuk menguasai rakyat yakni memacu rakyat menjadi manusia yang uniform. Politik adalah sinonim dengan pengendalian secara ketat terhadap negara dan rakyat. Karena itu sistem pendidikannya erat sekali berkaitan dengan sistem politik dan ambisi-ambisi politik negara tercerminkan pada kerangka filosofis dan praksis pendidikan (Kartini Kartono, 1997: 78).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dalam sejarah Islam hubungan antara pendidikan dan kebijakan politik dapat dilacak sejak masa-masa awal pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Kenyataan ini misalnya dapat dilihat dari pendirian banyak madrasah di Timur Tengah yang disponsori oleh penguasa politik. Contoh yang paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Bagdad yang didirikan sekitar tahun 1064 M oleh Wazir Dinasti Saljuk Nizam al-Mulk sebagai pendukung mazhab Sunni (Syafi'i). Lembaga ini merupakan lembaga tandingan Madrasah al-Azhar di Mesir yang pada awalnya didirikan Dinasti Fatimiyah untuk mendukung dan

menyebarkan mazhab Syi'ah (W. Montgomery Watt, 1976).

Fenomena tersebut, bahwa signifikansi dan implikasi politik dan pengembangan madrasah -- pendidikan Islam-- pada umumnya bagi penguasa Muslim sudah jelas. Madrasah-madrasah tersebut didirikan untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik tertentu dari penguasa Muslim, yakni untuk mendukung, menciptakan dan memperkokoh citra penguasa sebagai orang-orang yang mempunyai kesalehan dan kepedulian kepada kepentingan umat dan lebih penting lagi sebagai pembela ortodoksi Islam. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi penguasa *vis a vis* rakyat (Azyumardi Azra, 2002: 62.).

Kepentingan terselenggaranya pendidikan telah membawa dampak rekayasa kebudayaan demi eksistensi kebudayaan penggagas itu sendiri. Kadangkala lembaga-lembaga pendidikan itu menjadi sarana yang ampuh sebagai mesin perang yang sangat mengerikan. Sebagai contoh pertarungan antara kelompok sunni dan kelompok si'ah di negara-negara muslim menjadi kesalahan sejarah yang fatal akibat rekayasa pendidikan. Pertarungan ideologi-ideologi besar dunia, komunis, fasis, sosialis dan Islam, menjadi bukti lain yang mengantarkan pada pembasmian etnis.

C. Peran Pendidikan Islam

Berdasarkan landasan berpikir tersebut perlu upaya reorientasi pendidikan Islam di tengah masyarakat yang multikultural. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan formula pendidikan yang bebas dari kepentingan penggagas. Sebab pendidikan akan menjadi ajang pendoktrinasi jika tidak dibarengi dengan prinsip yang netral terhadap penggagas. Bagaimana mungkin pendidikan akan menjadi humanis jika lembaga pendidikan itu digembok dengan berbagai kepentingan-kepentingan. Berikut beberapa hal prinsip yang perlu dipertimbangkan;

Pertama, fungsi menumbuhkan kesadaran magis (*magical consciousness*). Kesadaran ini dikembangkan dengan suatu keadaan kesadaran yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Seringkali terjadi dalam dunia pendidikan bahwa alumni sebuah lembaga pendidikan tidak mampu berkreasi dan berkarya serta selalu tetap berada di pinggiran arus pembangunan yang berjalan begitu cepat. Akibatnya, jumlah pengangguran justru banyak diisi oleh kelas menengah terpelajar. Ketidakterdayaan kelas terpelajar ini sebenarnya diakibatkan oleh sistem sebagai struktur pembelajaran yang telah

menjerembabkannya ke dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Disebut menjerembabkan karena lembaga pendidikan telah membawa dampak pada alienasi (keterasingan) peserta didik terhadap dunia luar (Ivan Illich, 2000: 63).. Alienasi, dalam kerangka tradisional, dipahami bahwa peserta didik telah mempunyai persepsi bahwa sekolah atau lembaga pendidikan telah dianggap dapat menjanjikan kerja langsung, pada hal perkembangan dalam dunia kerja begitu cepat melebihi nalar keilmuan yang diajarkan di lembaga sekolah. Peserta didik telah dialienasikan oleh sekolah yang mengisolasi mereka ketika mereka bermaksud menjadi produsen dan konsumen dari pengetahuan mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena begitu peserta didik belajar dan diajar di lembaga sekolah maka orang akan kehilangan inisiatif untuk tumbuh mandiri dan menutup diri terhadap hal-hal yang berkembang di luar pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kreatifitas dan kemampuan diukur dari nilai-nilai yang diatur lembaga pendidikan dan kesuksesan seseorang juga ditentukan oleh seberapa tinggi nilai evaluasi yang didapatkannya dan seberapa tinggi gelar kesarjanaan yang diperolehnya. Lembaga pendidikan telah menjadi nilai konsumtif pasar kerja yang berkembang dengan memberikan

janji-janji pengembangan potensi kerja yang menggiurkan. Sehingga lembaga pendidikan telah menjadi lembaga rekayasa sosial yang paling ampuh untuk membuat orang teralienasi.

Salah satu problem pendidikan Islam yang mengarah kepada alienasi adalah pengembangan kurikulum nalar klasik. Nalar klasik dipahami sebagai pandangan yang berkembang dan terbentuk pada masa lampau akan tetapi keberadaannya selalu diulang-ulang pada masa sekarang tanpa adanya upaya tranformasi pemikiran untuk diderkonstruksi dan dekonstruksi sesuai dengan kondisi zaman.

Meminjam istilah yang dikemukakan al-Jabiri, bahwa nalar yang dikembangkan agama zaman sekarang adalah dunia nalar yang berkembang dalam dunia Arab Islam klasik. Oleh al-Jabiri menyebutnya dengan sebutan Nalar Arab. Nalar Arab dipahami sebagai sejumlah prinsip dan kaidah yang dikemukakan oleh kultur Arab bagi penganutnya sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan. Himpunan pengetahuan itu secara tidak sadar telah menjadi episteme bagi kebudayaan Arab Islam yang lahir dari kumpulan tradisi pemikiran yang diwariskan dari peradaban Islam pada abad pertengahan. Masa kemunculan kebudayaan itu, oleh al-Jabiri, disebut dengan masa kodifikasi

(*‘ashr tadwin*), yaitu masa di mana berlangsung proyek konstruksi budaya secara massif dalam pengalaman sejarah peradaban Islam, antara pertengahan abad 2 H dan pertengahan abad 4 H. Yang pada akhirnya peradaban ini membentuk sebuah kerangka rujukan bagi pemikiran Arab Islam dengan segenap disiplin keilmuannya yang beragam. Tentunya, masa kodifikasi ini bukanlah sekedar proses pembakuan dan pembakuan berbagai disiplin keilmuan akan tetapi harus dipahami pula sebagai rekonstruksi kebudayaan secara menyeluruh dengan segenap persoalan yang dikandung oleh proses pembakuan, baik yang berupa eliminasi, suplemasi, dominasi, pembungkaman, manipulasi dan penafsiran yang kesemuanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologis dan faktor-faktor sosio kultural yang beragam, yang secara tidak sadar telah diikuti secara “paksa” tanpa ada pengkritisan oleh pengikut-pengikut peradaban Arab Islam (Muhammad Abid al-Jabiri, 1991: 141).

Nalar Arab ini kemudian menjadi sejumlah prinsip dan kaidah yang dikemukakan oleh kebudayaan Arab Islam bagi penganutnya sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan mengharuskan mereka untuk menjadikannya sebagai sarana memperoleh pengetahuan dan

mengharuskan mereka untuk menjadikannya sebagai sistem pengetahuan, yaitu sebagai kumpulan dari konsep-konsep dan prosedur-prosedur yang memberikan pengetahuan secara tidak sadar sebagai episteme kultur Arab, yang pada akhirnya mengkristal mengisi sebuah peradaban yang statis dan absolut.

Ilmu pengetahuan Arab Islam yang muncul di dunia Arab yang semula diajarkan dengan nalar universal kemudian dibakukan melalui penafsiran tertentu yang diresmikan oleh lembaga umat sebagai sesuatu yang sudah selesai dan diajarkan secara terus menerus. Akibatnya umat Islam sekarang lebih mengenal produk pemahaman agama dari pada metode kemunculan produk, sehingga kreativitas berpikir menjadi statis. Pola pikir statis ini muncul sebagai akibat ketidakmampuan umat Islam dalam mendialogkan ilmu keislaman dengan fakta historis kealaman, sehingga menimbulkan alienasi dengan fakta.

Kedua, membangun kesadaran naif (*naival consciousness*). Lembaga pendidikan sebagai sebuah keadaan kesadaran yang melihat keterbelakangan oleh faktor individu dari orang lain. Dalam kesadaran ini masalah, etika, kreativitas, need for achievement dianggap sebagai perubahan sosial.

Pendidikan membangun individu yang mempunyai watak *negative and diagnostic* dan *positive and remedial*. Yang pertama, adalah membentuk manusia yang anti terhadap otoritarisme dan absolutisme terhadap segala bentuk yang meliputi semua bidang kehidupan baik agama, moral, sosial, politik dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adalah pendidikan berdasarkan pada suatu kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subyek yang memiliki potensi-potensi alamiah, terutama kekuatan-kekuatan mempertahankan diri untuk menghadapi dan mengatasi semua problem kehidupannya.

Pendidikan memberikan keyakinan baru akan pentingnya transformasi sosial sebagai bentuk kesadaran seseorang atas teori normatif pendidikan. Segala bentuk teori ilmu yang diajarkan hendaknya dapat membebaskan perilaku sehingga dapat membentuk kesalehan sosial, dalam bahasa agama disebut akhlaq karimah (saleh ritual dan saleh sosial sekaligus). Pendidikan yang awalnya untuk mengatur dan membekali potensi manusia harus dipahami secara produktif, namun kenyataannya justru menjadi sesuatu yang menakutkan dengan pemahaman yang dogmatik dan kaku. Hal ini dinyatakan dengan pemahaman out put pendidikan yang diukur dengan nilai serba

hitam merah. Nilai hitam jika peserta didik mendapatkan nilai yang tinggi dalam proses belajarnya begitu juga sebaliknya mendapat nilai merah jika peserta didik tidak mampu mendapatkan nilai standar yang telah ditentukan. Hal ini sangat berkonotasi pragmatisme.

Model penilaian salah benar dalam mengukur kelulusan pendidikan tersebut lebih mengarah nalar pragmatis. Nalar pragmatisme dalam dunia pendidikan lebih diakibatkan oleh paradigma budaya konsumerisme kapitalis. Sifat dasar dari paradigma ini adalah demi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sifat dasar pembangunan telah membentuk karakter yang mendasari terselenggaranya pembangunan secara pragmatis. Sikap pragmatisme ini merupakan sebuah sikap cara berpikir demi efisiensi dan efektivitas.

Ada argumen sederhana bagi kemunculan dampak negatif pembangunan yakni sikap pembangunan yang bersifat pragmatis lebih banyak tidak mengindahkan unsur kemanusiaan sebagai bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Sebab yang ada dalam benak para penggagas pembangunan hanyalah bagaimana cara membangun sarana secara efektif dan efisien dengan secepat mungkin hingga hasilnya dapat dinikmati. Pada hal kehendak yang demikian, sebenarnya serupa dengan motif yang ada pada ilmu

ekonomi klasik, yakni kapitalisme, yaitu dogma yang mengajarkan pada individu agar mampu mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Dari sinilah pembangunan kemudian membawa dampak negatif dengan munculnya hegemoni kultural dan politik dalam developmentalisme (Saiful Arif, 2000: 256).

Sebagai bentuk dari hegemoni kultural dapat dicermati dengan munculnya modernisasi sebagai salah satu jargon pembangunan. Dengan modernisasi, pembangunan telah menciptakan ideologi baru dan dengan pengaruh kultural dan politik melalui penciptaan diskursus sistemik dan terstruktur serta propaganda dan yang sistematis untuk mengganti ideologi, budaya dan politik rakyat yang subordinat. Agama, pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya digunakan aparat pembangunan untuk mengaburkan hubungan kekuasaan dan menyebabkan orang kehilangan nilai-nilai humanitas. Sebagai hegemoni, jargon modernisasi menciptakan konsep realitas pada seluruh masyarakat dalam semua kelembagaan dan dimanifestasikan secara seseorang sehingga mempengaruhi citra rasa, moralitas, adat istiadat, keagamaan dan politik maupun hubungan sosial.

Sebagai dampaknya tentu seluruh aspek humanitas manusia

telah terhegemoni pada budaya konsumerisme atau kebudayaan benda. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercerabut dan digantikan dengan nilai-nilai kebendaan. Keakuan manusia tidak lagi difokuskan pada kesucian jiwa akan tetapi pada prestasi akumulasi dan konsumerisme materi. Kehidupan telah berubah menjadi corak hedonistik, yakni kesuksesan dirumuskan sebagai sesuatu yang mendatangkan kenikmatan fisik. Padahal kenikmatan fisik seringkali menjerumuskan pada penghancuran kehidupan (Mansour Fakih, 2000: 86).

Dalam konteks pendidikan, sebagai salah satu sasaran propaganda pembangunan, tidak bisa lepas dari bidikan pragmatisme sebagai akses pembangunan bermazhab kapitalisme. Sebab realitas yang terjadi adalah kecenderungan menempatkan manusia sebagai pelaku atau robot pembangunan dan bukan manusia sebagai jiwa yang memiliki kompleksitas persoalan. Kritik ini diarahkan pada sistem pendidikan agama yanghanya sekedar membentuk manusia yang bermental dan berorientasi pada pembangunan dengan jargon profesinalisme. Karena bagaimanapun pembangunan membutuhkan keterlibatan pendidikan dalam rangka mensosialisasikan arti pentingnya pembangunan. Paradigma yang

digunakan adalah pradigma sumber daya manusia dari teori ekonomi klasik. Teori ini menempatkan manusia sebagai bagian penting dari faktor produksi. Dengan mengasumsikan manusia sebagai faktor produksi, maka paradigma ini tentu saja mereduksi manusia pekerja menjadi obyek. Sementara subyeknya adalah kapitalisme. Maka dari itu, pendidikan merupakan jalur strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia yang produktif. Tampaknya hanya dengan pendidikan yang diformalkan manusia akan dapat bekerja secara produktif. Pendidikan diformat semata-mata sebagai sertifikat yang harus dimiliki setiap orang untuk dapat bekerja. Jelasnya, adalah manusia dalam menempuh pendidikan hanya dipahami sebagai kerangka pragmatis mencarikerja. Ukuran sukses tidaknya seseorang dalam menempuh pendidikan ditentukan oleh kesuksesan seseorang dalam bekerja sesuai dengan bidang studi dalam pendidikan. Pendidikan tidak dipahami sebagai pengembangan keilmuan akan tetapi pendidikan dipahami sebagai pencarian pekerjaan yang bersifat praktis. Kenyataan bahwa pendidikan hanya sekedar diarahkan untuk memenuhi panggilan pembangunan dapat dibuktikan semakin melemahnya kesadaran manusia bahwa kehidupan itu diciptakan secara sosial.

Pendidikan, pasar dan politik pada akhirnya menjadi saling terkait dan merupakan lingkaran dalam sebuah sistem yang nyaris tidak dapat dipisahkan. Konsep link and match yang dipakai seringkali mengehendaki manusia diarahkan hanya sekedar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Sistem pendidikan yang semacam inilah yang cenderung menciptakan manusia pragmatis pembangunan yang hanya mampu menuruti aktor kekuasaan. Manusia kemudian menjadi tidak hanya imajinasi sosiologis untuk mengekspresikan realitas yang berada di luar sistem. Keseluruhan mekanisme dan tindakan pembangunan harus sesuai dengan kesepakatan yang berada dalam sistem yang diajarkan oleh sistem pendidikan. Dari sinilah yang dimaksud pendidikan telah membatasi manusia yang terkungkung dalam nalar pragmatis.

Ketiga, membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*). Kesadaran ini memandang sebab masalah dilihat dari sistem alam atau struktur sebagai sumber masalah. Kesadaran ini memberikan ruang bagi masyarakat agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam struktur yang ada dan mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur lembaga.

Struktur dipahami sebagai realitas yang dilihat sebagaimana

adanya yang diletakkan sebagai sebuah sistem. Dalam hal ini lembaga pendidikan merupakan bagian dari struktur realitas. Oleh karenanya, pendidikan seharusnya dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat melihat sistem yang menjadi sasarannya untuk membuka sistem yang membelenggu dirinya. Sebagai contoh munculnya keterasingan karena diskriminasi peran kelompok minoritas dalam kelompok mayoritas masyarakat atau munculnya keterasingan seseorang karena kemiskinan dilihat karena adanya sistem realitas yang mengitarinya tidak memungkinkan seseorang untuk dapat keluar dari gubangan sistem yang membelenggu. Biasanya dalam diskriminasi menandakan adanya penindasan, peminggiran dan ketidakadilan sosial. Karena adanya unsur superioritas kelompok atau sistem terhadap kelompok lainnya. Ada banyak faktor mengapa pendidikan sering ditampilkan dalam corak diskriminatif. Salah satunya adalah adanya klaim kebenaran yang tidak disertai dengan adanya pemahaman kemajemukan.

Faktor ini dapat dicermati dari pelaksanaan pendidikan agama dengan nalar eksklusif. Secara harfiah eksklusif berarti sendirian, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara sosial pengertian ini

dipahami sebagai sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip diri sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan pandangan, pemikiran dan prinsip yang dianut orang lain adalah sesat, salah dan harus di jauhi. Tentunya, pendapat seperti ini akan berdampak pada peminggiran saran dan pemikiran yang berasal dari kelompok lainnya.

Eksklusifisme pendidikan agama ini terjadi karena beberapa hal, pertama, pendidikan agama yang dikembangkan telah terbakukan melalui penafsiran-penafsiran tertentu yang diresmikan oleh lembaga-lembaga keagamaan tertentu, kemudian diajarkan kepada masyarakat. Sebagai dampak penafsiran ini agama yang semula memesankan pada pembebasan pada akhirnya kehilangan pesan kemanusiaan sebagai agama pembebas dan ideologisasi yang berakibat pada dehumanisasi.

Ketika agama mengalami proses pelembagaan yang berlebihan maka yang terjadi adalah pembungkaman kekayaan penafsiran, di luar tafsir resmi yang diakui oleh lembaga berwenang mustahil ada tafsir lain yang diakui kebenarannya. Kitab suci agama yang semula terbuka kepada tafsir dibungkam suaranya menjadi hanya berbunyi satu tafsir. Masyarakat agama yang di luar daerah tafsir resmi tersebut akan dicap murtad atau bid'ah. Proses dialogis pada

tataran ini dimungkinkan tidak lagi terdapat tempat yang selayaknya.

Suasana seperti ini dapat dicermati pada kasus lembaga pendidikan agama di Indonesia, umumnya juga terjadi di lembaga pendidikan agama seluruh dunia Islam. Di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan agama banyak didirikan oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan tertentu, misalkan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Ahmadiyah dan lembaga sosial keagamaan lainnya, adalah merupakan contoh sebuah pengkaderan paham atas tafsir agama tertentu. Walaupun model seperti ini dibenarkan menurut ilmu sosiologi, namun pengkotak-kotakkan ini pada akhirnya menimbulkan mazhab dari kelompok tertentu yang secara tidak sadar telah menimbulkan fanatisme mazhab dari kelompok tertentu pula, jika proses pembelajaran agama tidak dibarengi dengan pemahaman multitafsir. Corak seperti ini tentunya tidak menguntungkan bagi pengembangan nalar kritis pluralis di tengah masyarakat yang multi etnis.

Kedua, adanya keterasingan manusia sebagai peserta didik atas lingkungan sekitarnya. Konsep ini berangkat dari hakekat manusia yang pada intinya adalah bebas dan merdeka. Pendidikan agama seharusnya bertolak dari pengenalan dirinya sendiri dan realitas

lingkungan manusia. Seringkali, pendidikan dianggap sebagai investasi material untuk meneruskan tradisi dan kekayaan intelektual dari generasi kepada generasi selanjutnya. Model ini disebut dengan sistem pendidikan bank (*banking education system*). Disebut demikian karena dalam prakteknya pendidikan hanyalah proses pengalihan pengetahuan (*transfer of knowledge*). Dari sini dipahami atau tidak proses seperti ini akan menimbulkan nalar eksklusif karena pada dasarnya sistem pendidikan yang dikembangkan menganut sistem searah dan tidak menampilkan sistem dialogis.

Dalam konteks edukasi selama tidak ada kesadaran dialogis yang mengarah kepada kualitas kesadaran dan pengetahuan yang memadai, peserta didik akan terus bungkam meskipun berada di bawah tekanan struktural atau sistem sosial. Akibatnya, peserta didik tidak mengkreasi sejarah dan budayanya sendiri. Situasi terbungkam inilah yang menimbulkan kebudayaan bisu (*culture of silence*). Secara filosofis, dalam pandangan yang sama tapi dalam bahasa yang berbeda, bahwa pendidikan agama yang dikembangkan masih berkuat pada dataran normativitas teks agama kurang memperhatikan aspek historisitas kekinian teks. Ajaran agama yang bersifat normaif telah diklaim sebagai yang bersumber

dari Tuhan yang suci, bersifat samawi, bersifat sakral, bersifat menjadi agama yang mempunyai keunikan ciri yang spesifik sekaligus membedakannya dari jenis pengalaman budaya dan sosial keagamaan. Jika klaim kebenaran berbenturan dengan historisitas teks agama yang bergulat dengan faktor kepentingan, baik kepentingan kelompok, golongan, etnis, birokrasi, maka akan muncullah ketegangan antar penafsiran atas historisitas teks agama. Penafsiran agama yang diklaim sebagai agama itulah yang kemudian rentan akan memunculkan konflik. Karena konflik diidentifikasi sebagai penafsiran tunggal yang diklaim sebagai sebuah kebenaran agama secara absolut yang mengesampingkan terhadap kebenaran agama lain.

Persoalan ini terjadi karena muatan pendidikan agama yang dikembangkan telah terbakukan melalui penafsiran-penafsiran tertentu yang diresmikan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang dibentuk lembaga sosial tertentu untuk kemudian diajarkan kepada peserta didik atau masyarakat. Agama yang semula memesankan pada pembebasan, pada akhirnya agama kehilangan pesan profetisnya sebagai agama pembebas dan ideologisasi yang berakibat pada dehumanisasi. Ketika agama mengalami proses pelebagaan yang berlebihan maka yang terjadi

adalah pembungkaman kekayaan tafsir, di luar tafsir resmi yang diakui oleh lembaga lain mustahil ada tafsir yang diakui kebenarannya. Kitab suci yang semula terbuka kepada semua tafsir dibungkam suaranya menjadi hanya berbunyi satu tafsir. Masyarakat agama yang berada di luar daerah tafsir resmi akan dicap mrtad atau bid'ah. Hal ini jelas akan menghilangkan rasa kemanusiaan antar sesama (Amin Abdullah, 2001: 8.).

Seringkali dijumpai dalam doktrin agama selalu menggunakan sistem pemahaman pengajaran agama dengan menggagas pendekatan konflik yang tanpa disadari telah megarahkan pada eksklusivitas pluralisme agama. Wacana iman versus kafir, muslim versus non muslim, sorga versus neraka menjadi bahan kurikulum yang dogmatik. Pelajaran teologi seperti itu memang tidak dapat dihindari namun pengajaran itu hanya diajarkan sekedar memperkuat keimanan dan pencapaiannya menuju surga tanpa dibarengi dengan kesadaran berdialog dan perlunya transformasi sosial ajaran agama. Akibatnya, tentulah sangat fatal yakni paradigma eksklusif doktrinal yang menciptakan kesadaran umat agama untuk memandang umat agama lain secara antagonistic. Oleh karenanya, pendidikan agama harus melakukan reorientasi filosofis paradigmatic

tentang bagaimana membenuk kesadaran peserta didik berwajah inklusif tanpa harus menghilangkan kesadaran akan keyakinannya.

Persoalan lain yang tidak kalah menariknya adalah pembentukan nalar jender dalam dunia pendidikan sebagai akibat sistem struktur yang telah terbentuk secara tidak disengaja. Istilah gender seringkali dirancukan dengan seks. Kedua istilah ini berbeda, jika lebih digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya. Sementara sex lebih digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Istilah seks lebih banya berkonotasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan anatomi fisik, hormon dalam tubuh, reproduksi dan karakteristik biologisnya lain. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Secara konseptual tidaklah menimbulkan perbedaan. Namun dalam realitas sosial perbedaan gender telah menimbulkan perdebatan. Perdebatan muncul karena disinyalir telah menimbulkan ketidakadilan peran antara laki-laki dan wanita dalam realitas sosial. Ketidakadilan itu muncul karena adanya kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender.

Pemutarbaikan ini sebagai bentuk peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, di mana apa yang sesungguhnya gender, karena adanya konstruksi sosial, maka justru dianggap sebagai kodrati yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Misalkan peran perempuan dalam bidang domestik sering dianggap sebagai kodrat wanita. Pada hal dalam kenyataannya peran tersebut merupakan konstruksi peran kultural dalam masyarakat. Boleh jadi urusan tersebut akan dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu dapat dipertukarkan apa yang sering disebut kodrat wanita atau taqdir Tuhan atas wanita dalam kasus ini adalah peran gender (Mansour Fakih, 1996: 7).

Perbedaan gender sebenarnya tidaklah menimbulkan persolan selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Munculnya ketidakadilan merupakan sistem dan struktur di mana baik laki-laki maupun wanita menjadi korban dari adanya sistem tersebut. Untuk melihat ketidakadilan gender dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan yang ada. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tetap langgengnya budaya gender. Di antaranya adalah pendidikan di samping sebagai faktor lain, semisal, tafsir agama, budaya, etnis dan kebijakan kekuasaan. Faktor-faktor ini berperan dalam

menghambat perjuangan kaum feminis sekaligus langgengnya bias gender.

Pendidikan agama dapat pula menjadi faktor kelanggengan bias gender. Beberapa indikasi yang dapat dijadikan patokan adalah pada ajaran agama sebagai materi pendidikan agama itu sendiri. Agama yang diyakini sebagai pegangan hidup memiliki pengaruh fungsional terhadap struktur sosial masyarakat. Berkat adanya penafsiran agama oleh pemeluknya agama telah berfungsi sebagai alat legitimasi terhadap struktur sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat termasuk salah satunya struktur sosial yang melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan. Di sinilah ajaran agama yang ditafsirkan telah berdampak pada pelanggengan bias gender.

Adanya bias gender dalam sejarah peradaban Islam sudah muncul sejak Islam ada di jazirah Arab. Dalam kehidupan masyarakat Arab bias gender terjadi karena berkembangnya corak ideologi patriarki yang memberikan otoritas dan dominasi kepada kaum laki-laki dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kaum laki-laki pada umumnya memperoleh kesempatan yang lebih besar dari pada perempuan untuk memperoleh prestasi dan prestise kehidupan sosial kemasyarakatan (Ahmad Muthali'in, 2001: 43).

Budaya patriarki ini dalam sejarah kemajuan intelektual Islam telah menjadi peradaban. Sehingga penafsiran agama Islam dengan nuansa patriarki ini sudah menjadi sistem nilai. Sistem nilai merupakan unsur kebudayaan yang paling sulit berubah, sekaligus berpengaruh cukup kuat pada sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, penafsiran agama dengan bias gender tersebut tetap bertahan meskipun gerakan feminisme terus berjuang untuk mendobraknya. Tetap saja, penafsiran agama menjadi benteng yang cukup kuat dalam melanggengkan bias gender dalam masyarakat.

Corak nalar tafsir agama sudah terlanjur secara turun temurun dianut tanpa kritik. Secara antropologi keilmuan Islam, nalar yang dikembangkan merupakan hasil produk penafsiran dari dunia Arab Islam pada masa pembukuan (kodifikasi) atau pencatatan sampai sekarang ini, maka adalah merupakan fakta yang dinamika internalnya tidak mampu lagi mengekspresikan dirinya dalam menghasilkan pengetahuan baru kecuali hanya dalam bentuk reproduksi pengetahuan lama. Pengetahuan-pengetahuan ini kemudian diimpor oleh ulama-ulama Indonesia melalui jaringan ulama, sehingga keberadaan tafsir agama tidak jauh berbeda dengan apa yang

dipelajari di dunia Arab Islam abad pertengahan.

Dari paparan tersebut bahwa rujukan proses pengajaran materi agama yang diajarkan di lembaga-lembaga agama tidaklah berbeda dengan wacana intelektual Islam masa lalu. Nalar gender yang berujung pada pelestarian bias gender tetap menjadi nuansa yang sangat mengkhawatirkan.

Ilmu-ilmu agama yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan agama yang bernuansa pemikiran klasik, misalkan fiqh, hadist dan tafsir tanda disadari seringkali ditafsirkan dengan nuansa patriarki. Sehingga nuansa ketidakadilan gender sangat mencolok. Sebagai ilustrasi banyak kajian-kajian fiqh yang diajarkan di lembaga agama yang tanpa disadari menimbulkan bias gender jika tanpa dibarengi dengan nalar kritis. Salah satu kasus ajaran fiqh misalkan, yang mengatur kedudukan perempuan dalam perkawinan, dalam pembagian warisan, sebagai saksi, sebagai pemimpin dan lain sebagainya, seringkali menempatkan perempuan sebagai pihak kedua. Dalam perkawinan perempuan ditempatkan sebagai obyek sedangkan laki-laki sebagai subyek. Dalam pengertian, bahwa perempuan ditempatkan sebagai pihak yang diatur sedangkan laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang mengatur.

Dalam bidang tafsir penafsiran al-Qur'an juga seringkali dikemukakan oleh para mufassir yang mengarah kepada ketidakadilan gender. Walaupun sebenarnya al-Qur'an lebih mengarahkan kepada persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, penafsiran yang bernuansa bias gender terjadi yang dalam kenyataannya penafsiran al-Qur'an lebih banyak mendukung peranan laki-laki dari pada wanita. Bias gender dalam penafsiran ini sebenarnya lebih didukung oleh peranan laki-laki sebagai penafsir atas perempuan yang mengarah pada sifat-sifat feminim dan maskulin penafsir. Pemilahan sifat dan peran tersebut mengakibatkan terjadinya dominasi dan subordinasi penafsiran teks. Karena sifat penafsir yang maskulin muncullah dominasi gagasan laki-laki yang maskulin terhadap teks atas perempuan yang kemudian terealisasikan dengan baik dalam kehidupan.

D. Penutup

Beberapa antisipasi pengembangan pengembangan lembaga pendidikan Islam seperti yang didiskusikan tersebut merupakan antisipasi di masa depan dalam upaya menghadapi perkembangan akan kebutuhan pendidikan di tengah masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural sangat membutuhkan

tenaga profesional yang digembleng di lembaga pendidikan. Oleh karenanya, terdapat tantangan lembaga pendidikan Islam antara idealisme dakwah Islam dan tuntutan praktis. Apakah lembaga pendidikan Islam tetap pada idealismenya ataukah hanyut dalam dunia pragmatisme. Jawaban dari pertanyaan ini dibutuhkan analisis yang komprehensif supaya idealisme pendidikan Islam tidak luntur, begitu juga pendidikan Islam tidak ketinggalan dengan kemajuan masyarakat industri yang kompleks begitu cepat. Perkembangan ini tentu menimbulkan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dan lebih rumit, maka diperlukan desain lembaga pendidikan yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Amin Abdullah, "Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama," dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 11 tahun 2001.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta; Logos, 2002.
- Ivan Illich, *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*, penerj. A.

- Sonny Keraf, Jakarta: Yayasan Obor, 2000.
- Ivan Illich, *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*, penerj. Sony Keraf, Jakarta; Yayasan Obor, 2000.
- Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, Jakarta: Pradya Paramita, 1997.
- Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik Dan Sugesti*, Jakarta; Pradya Paramita, 1997.
- Keterangan tentang madrasah Nizamiyah dapat dilihat lebih lanjut lewat karyanya W. Montgomery Watt, *The Majesty That Was Islam*, London; Sidgwick & Jackson, 1976.
- Bayard Dodge, *al-Azhar: a Millenium of Muslim Learning*, Washington D.C: The Mindle East Institute, 1961.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996.
- Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Muhammad Abid al-Jabiri, *at-Turast wa al-Hadastah: Dirasah wa Munaqasat*, Beirut: al-Markaz as-Siqafi al-‘Arabi, 1991.
- Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Media Cita, 2000.
- Paulo Freire, dkk., *Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal dan Anarkis*, penerj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.